



PENGAWASAN PPDB SMA DIPERKETAT

Operator Nakal, Terancam Sanksi Kepegawaian

YOGYA (KR) - Pengawasan terhadap proses verifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) reguler jenjang SMA/SMK negeri yang mulai dilaksanakan Senin (1/7) hari ini akan diperketat. Di samping ada pengawas sekolah yang rutin melakukan monitoring, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga terjun langsung ke sekolah-sekolah.

Pengawasan yang cukup ketat tersebut, ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana, untuk memastikan seluruh proses PPDB berjalan transparan. "Jangan kaget jika besok saya serta petugas dari dinas tiba-tiba ada di sekolah untuk mengecek seluruh berkas yang diverifikasi. Ini bentuk pengawasan kami," paparnya saat dikonfirmasi, Minggu (30/6).

Kendati proses PPDB sudah dilakukan secara *online*, namun tidak menutup kemungkinan adanya operator yang nakal. Khususnya operator yang ada di sekolah dan bertugas melakukan *entry* data calon siswa baru. Terutama saat menerima berkas pendaftaran dari calon siswa yang berasal dari luar kota.

Dikhawatirkan, siswa tersebut tidak mengumpulkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli untuk

mendaftar sekolah di Kota Yogyakarta. Namun, oleh operator bisa saja tetap diterima dan datanya masuk ke dalam sistem. "Jika ada operator yang melakukan seperti itu, maka jelas pelanggaran," tegas Edy.

Meski demikian, Edy juga memastikan, tidak ada operator yang berani berbuat kecurangan. Pasalnya, mulai tahun ini seluruh PPDB *online* hanya diikuti sekolah negeri. Sehingga seluruh petugas teknis merupakan PNS dan setiap tindakan kecurangan yang dilakukan terancam sanksi yang langsung masuk ke ranah kepegawaian.

Ketua Panitia PPDB Kota Yogyakarta 2013 Samiyo menambahkan, pihaknya memastikan tidak ada operator sekolah yang berani bertindak curang. Seluruh proses PPDB berlangsung transparan dan publik juga dapat melakukan

pengawasan.

Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Dr Wuryadi menyatakan, setiap orangtua pasti akan berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Kendati demikian bukan berarti mereka harus memaksakan anaknya untuk masuk sekolah tertentu. Karena itu, selain kualitas, alangkah baiknya jika orangtua juga mempertimbangkan jarak sekolah dengan rumah.

"Saya kira selain kemampuan anak dan kualitas sekolah yang dituju, jarak juga perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, selain bisa terjadi pemerataan, pendaftar tidak akan terkonsentrasi di kabupaten/kota tertentu," katanya.

Wuryadi mengakui, pemerataan kualitas pendidikan di DIY belum bisa dikatakan optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk meningkatkan

kualitas pengajar dan fasilitas pembelajaran yang dimiliki. Jika hal itu bisa diwujudkan, peningkatan mutu pendidikan di sekolah diharapkan bisa terwujud. Sehingga bisa terjadi pemerataan kualitas pendidikan di DIY.

"Meski kualitas di sejumlah kabupaten di DIY sudah cukup bagus, Kota Yogya masih menjadi pilihan bagi sejumlah orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan persebaran lulusan jadi tidak merata. Akibatnya siswa yang nilainya *pas-pasan* kesulitan mendapatkan sekolah," terang pakar pendidikan dari UNY tersebut.

Ditambahkan, kecermatan orangtua dalam memilih sekolah memiliki peran penting bagi keberhasilan siswa. Tentunya semua itu harus disesuaikan bakat dan potensi siswa. Sebab jika hal itu diabaikan dan orangtua lebih mengedepankan keinginannya, dikhawatirkan hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. **(R-9/Ria)-g**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005